

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

**RENJA DPUTR
TAHUN 2024**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahun ke-1 (satu) berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan Kabupaten Purwakarta di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan, jembatan dan irigasi yang efisien dan efektif. Konsep pembangunan infrastruktur perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan untuk sektor infrastruktur di seluruh Kabupaten Purwakarta.

Rencana Kerja Dinas PUTR disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan dari usulan masyarakat, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari anggaran APBD, APBD Prov, APBN maupun sumber lainnya.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari rencana strategis diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala PD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja PD serta keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip strategis, demokrasi dan partisipatif, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 dikemukakan bahwa Rencana Kerja PD sebagai penjabaran Rencana Strategis PD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diharapkan merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup kebinamargaan dan sumber daya air, dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pelayanan infrastruktur jalan dan pengairan.

Semoga Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwakarta, 15 Juli 2023

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA



RYAN OKTAVIA, ST, MT, MM
NIP. 19731017 199901 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta	4
1.3 Landasan Hukum	7
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelahaan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	27
3.2 Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	42
BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

		Halaman
1	Table 1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022	6
2	Tabel 2.1 (TC-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	10
3	Tabel 2.2 Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2021	15
4	Tabel 2.3 Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2021	16
5	Tabel 2.4 Kondisi Jalan Kabupaten Baik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021	16
6	Tabel 2.5 Kondisi Jalan Kabupaten Mantap di Kabupaten Purwakarta	16
7	Table 2.8 (TC-31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023	22
8	Table 3.2 (TC-32) Usulan Program dan kegiatan Tahun 2023 dari para pemangku Kepentingan dan Aspirasi Masyarakat	26
9	Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	28
10	Tabel 3.2 (TC-33) Rencana kerja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju di tahun 2024	34
11	Tabel 4.1 (TC-34) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 2018 - 2023	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan RKPD	4

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Grafik 2.1 Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2022	17
2. Grafik 2.2 Kondisi Jalan Kabupaten Baik Tahun 2022	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Renja DPUTR) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja PD sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Perangkat Daerah secara keseluruhan dengan untuk rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyusun strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten dan kota merupakan bagian dari provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan Perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara dan APBD.

A. Definisi Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 memiliki dinamika tersendiri. Adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan warna baru dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2024. Hal ini berkonsekuensi dilakukannya pemetaan yang mensinergikan seluruh program sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta dengan program yang telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah untuk seluruh kabupaten/kota se- Indonesia, mulai tahun 2024.

Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta untuk periode tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta sebagai penjabaran dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta sub urusan yang telah ditetapkan. Renja ini disusun dengan tetap mempedomani Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

B. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta disusun dengan berbagai pendekatan, antara lain :

1. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif,

Perencanaan melibatkan peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan ketahanan pangan. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan disetiap tahapan penyusunan renstra, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel akan menghasilkan konsensus atau kesepakatan terhadap perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusantujuan, kebijakan dan strategis serta prioritas program dan kegiatan.

2. Pendekatan Politis,

Perencanaan Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023, yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

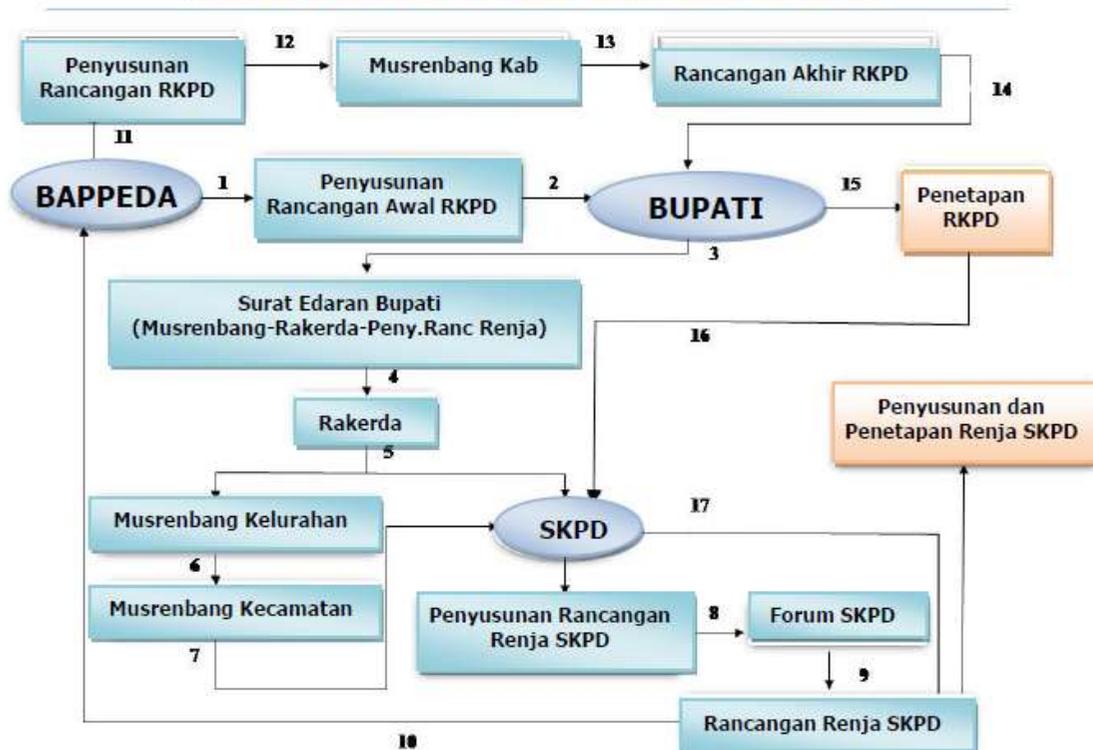
3. Pendekatan Top Down,

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/kerja, mulai dari tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota, sehingga terjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.

4. Pendekatan Bottom Up,

Perencanaan dilaksanakan dengan menampung aspirasi dari masyarakat secara partisipatif kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, sehingga terjamin terciptanya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

ALUR PROSES PENYUSUNAN RKPD



Gambar 2. Alur Proses Penyusunan RKPD

C. Keterkaitan Renja dengan RKPD.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitannya dengan Renja K/L vertikal dan Renja Provinsi Jawa Barat, tertuang dalam table berikut :

1. Table TC-29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022.
2. Table TC-31: Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
3. Table TC-32: Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan dan Aspirasi Masyarakat.
4. Table TC-33: Rencana kerja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju di tahun 2025

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Kebinamargaan dan Pengairan, bidang Perencanaan, bidang Pengawasan dan Pengendalian.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penetapan tujuan secara umum di dasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan semua program dan kegiatan, agar dalam pelaksanaannya terjalin sinergitas dengan misi yang telah di tetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan Prioritas Tujuan Dinas **“MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN WILAYAH”**.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dengan fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Dalam rangka menunjang operasionalisasi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasarannya adalah: **“MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH”**.

Atas dasar hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah pula menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Indikator Tujuan :

1. Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan Target : 85,00%
2. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Sekunder Target : 84,50%
3. Terwujudnya Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah yang dibangun dan direvitalisasi Target : 100%

Sasaran :

Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap

Indikator Sasaran :

Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik

Indikator Sasaran :

Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/dibangun

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah

Indikator Sasaran :

Terlaksananya penyelenggaraan tata ruang daerah Kabupaten/Kota

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Purwakarta

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Tahun ke				
				2024	2025	2026	2027	2028
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	95%	95%	95%		
	Terwujudnya Pemeliharaan dan Penanganan Jalan	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan	85.00 %	85.00 %	85.00 %		
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan	Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi	84.71%	84.71 %	84.71 %		
	Terwujudnya Pembangunan dan Pemeliharaan pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik	Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/ dibangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit		
	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan tata ruang daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	500

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 264 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No.264 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati nomor 232 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021
11. Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2023 tentang rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP.

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renja secara keseluruhan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh Karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dapat disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Dalam Rencana kerja dan Dokumen Pelaksaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 134,876,617,554,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan-4 sebesar Rp. 114,591,174,00 atau sebesar 84,96 %.

Adapun uraian capaian kinerja tiap Program dan kegiatan tahun 2023 Triwulan ke-4 seperti yang tercantum dari table terlihat bahwa Program Utama yaitu Penyelenggaraan Jalan pada Triwulan ke-4 ini tercapai 87,53% dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terserap sebesar 99,29% dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terserap sebesar 100%.

Sedangkan capaian kinerja tiap Program Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi realisasinya sebesar 97,38% dan bidang Sekretariat yang terdiri dari 3 Subbagiab yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, realisasi pada tahun 2023 mencapai 91,43%.

Realisasi lengkap per Kegiatan dapat dilihat pada tabel TC-29 dibawah ini.

No.	Kode Kegiatan	Uraian Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi TW-4			
			Perubahan	Capaian	Anggaran	Keu (%)	Fisik (%)
			Anggaran				
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (DPUTR)	203.508.885.596		134.876.617.554	66,28%	84,96%
	1.03.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.908.801.875		24.642.424.493	82,39%	91,43%
	1.03.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.000.000		114.480.000	81,77%	100,00%
1	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	2 Dokumen	30.320.000	100,00%	100,00%
2	1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	100,00%	100,00%
3	1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	100,00%	100,00%
4	1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	100,00%	100,00%
5	1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	100,00%	100,00%
6	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	2 Dokumen	24.160.000	60,40%	100,00%
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.422.467.641		13.837.161.324	84,26%	97,57%
1	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.332.467.641	14 bulan	13.747.161.924	84,17%	80,56%
3	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.500.000	1 Dokumen	12.499.900	100,00%	100,00%
4	1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	100,00%	100,00%
5	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	100,00%	100,00%
6	1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000	1 Dokumen	9.999.900	100,00%	100,00%
7	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10.000.000	1 Laporan	9.999.900	100,00%	100,00%
8	1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	2 Dokumen	24.999.700	100,00%	100,00%
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.000.000		36.426.900	40,47%	100,00%
1	1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	1 Dokumen	13.147.900	52,59%	100,00%
2	1.03.01.2.03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	1 Laporan	2.424.900	16,17%	100,00%
3	1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	1 Laporan	3.315.000	22,10%	100,00%
4	1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.000.000	1 Laporan	17.539.100	50,11%	100,00%
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000		50.000.000	100,00%	100,00%
1	1.03.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	100,00%	100,00%
2	1.03.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	100,00%	100,00%
3	1.03.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	100,00%	100,00%
4	1.03.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	100,00%	100,00%
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	811.666.100		510.965.600	62,95%	83,33%
1	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	376.666.100	262 Stel	354.230.000	94,04%	100,00%
2	1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000	1 Dokumen	8.823.300	25,21%	100,00%
3	1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000	1 Dokumen	12.764.300	63,82%	100,00%
4	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175.000.000	12 Orang	29.167.600	16,67%	100,00%
5	1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	50 orang	0	0,00%	0,00%
6	1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.000.000	120 Orang	105.980.400	92,16%	100,00%

	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.670.915.956		1.060.512.990	63,47%	64,75%
1	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	15 Item	71.233.200	47,49%	47,49%
2	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	21 Item	196.398.700	98,20%	100,00%
3	1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	45 Item	134.631.240	67,32%	100,00%
4	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000	38 Item	195.694.800	78,28%	100,00%
5	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	14 Item	199.621.800	99,81%	100,00%
6	1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000	5 Item	0	0,00%	0,00%
7	1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	1170 Dus	0	0,00%	0,00%
8	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.915.956	12 Laporan	158.864.200	32,69%	100,00%
9	1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	5 unit	5.463.500	27,32%	0,00%
10	1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	105.000.000	2 Dokumen	98.605.550	93,91%	100,00%
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.518.288.300		2.086.779.702	82,87%	100,00%
3	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	205.000.000	57 Unit	200.444.300	97,78%	100,00%
4	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.270.878.300	120 Unit	1.255.466.700	98,79%	100,00%
5	1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000	2 Bangunan	211.786.846	35,30%	100,00%
6	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	442.410.000	2 Bangunan	419.081.850	94,73%	100,00%
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.274.501.278		4.332.899.107	82,15%	100,00%
1	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	300 Lembar	10.000.000	100,00%	100,00%
2	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	487.262.430	12 Laporan	291.027.146	59,73%	100,00%
3	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.454.600	1 Laporan	43.524.600	35,54%	100,00%
4	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.654.784.248	12 Laporan	3.988.347.361	85,68%	100,00%
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.930.962.600		2.613.198.870	89,16%	77,20%
1	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	662.636.800	22 Unit	565.787.953	100,00%	71,08%
2	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	669.132.500	35 Unit	616.239.709	92,10%	92,10%
3	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	409.412.500	14 Unit	380.773.890	93,00%	100,00%
4	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000	60 Unit	0	0,00%	0,00%
5	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	864.780.800	2 Unit (Bangunan)	859.863.707	99,43%	100,00%
6	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	1 Bangunan	190.533.611	95,27%	100,00%

	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.985.654.756		18.545.950.725	80,68%	99,29%
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	925.800.000		906.268.800	97,89%	100,00%
1	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	925.800.000	7 Dokumen	906.268.800	97,89%	100,00%
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.059.854.756		17.639.681.925	79,96%	99,95%
1	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.834.650.000	7 Dokumen	608.818.525	33,18%	95,00%
2	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	11.707.664.016	5,825 M	10.334.774.300	88,27%	100,00%
3	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.092.540.740	2,526 M	4.862.016.100	95,47%	100,00%
4	1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	542.500.000	5 Bendung	209.159.000	38,55%	100,00%
5	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.341.500.000	0,780 KM	1.417.323.000	60,53%	100,00%
6	1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	541.000.000	5 Bendung	207.591.000	38,37%	100,00%
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.846.000.000		1.405.071.800	76,11%	90,00%
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.846.000.000		1.405.071.800		
1	1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	106.000.000	1 Dokumen	103.957.800	98,07%	100,00%
3	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	804.500.000	288,8 M	264.251.000	32,85%	100,00%
4	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	921.100.000	391 M	386.219.000	41,93%	100,00%
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	39.133.607.180		27.548.403.320	70,40%	97,38%
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	39.133.607.180		27.548.403.320		
1	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	659.256.000	3 Dokumen	397.133.000	60,24%	95,00%
2	1.03.08.2.01.02	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	23.479.695.188	14 Dokumen Perencanaan	12.166.857.680	51,82%	99,00%
3	1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	159.310.000	1 Dokumen	147.990.000	92,89%	100,00%
4	1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	210.028.100	3 Dokumen	67.233.100	32,01%	100,00%
5	1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	20.000.100	1 Dokumen	6.350.100	31,75%	95,00%
6	1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	190.000.000	1 Unit	32.500.000	17,11%	100,00%
7	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10.823.149.835	9 Unit gedung	6.717.493.400	62,07%	95,00%
8	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.592.167.957	5 Unit gedung	2.337.883.000	65,08%	95,00%

	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	307.999.600		255.489.600	82,95%	100,00%
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	307.999.600		255.489.600		
1	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	307.999.600	1 Dokumen	7.099.600	2,31%	100,00%
	1.03.10.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	102.887.194.725		60.917.333.766	59,21%	87,53%
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	102.887.194.725		60.917.333.766	59,21%	100,00%
1	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.350.000.000	16 Dokumen	1.721.480.950	39,57%	100,00%
2	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	4.836.875.000	0 m2	15.675.000	0,32%	5,00%
3	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	839.940.000	2 Dokumen	827.476.000	98,52%	100,00%
4	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	946.057.500	0 Dokumen	182.122.440	19,25%	100,00%
5	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	26.126.632.898	7688, 19 paket	9.858.479.132	37,73%	90,84%
6	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	20.266.392.809	14548, 9 paket	3.988.118.308	19,68%	67,00%
7	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	21.153.460.664	56 Km	15.857.664.900	74,96%	100,00%
8	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	18.663.083.068	2 Unit	13.432.189.730	71,97%	100,00%
9	1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	3.545.808.036	486 M	2.208.439.000	62,28%	100,00%
10	1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	400.000.000	5 Dokumen	60.860.000	15,22%	100,00%
11	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.758.944.750	15 Dokumen	386.721.300	21,99%	100,00%
	1.03.11.2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300.250.000		265.698.350	88,49%	50,00%
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	273.050.000	1 Dokumen	265.698.350		
2	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	104.028.000	20 Orang	102.549.500	98,58%	100,00%
3	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	169.022.000	0	4.564.000	2,70%	0,00%
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	27.200.000		2.340.000		
1	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	27.200.000	1 Laporan	2.340.000	8,60%	100,00%

	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.025.511.710		237.792.400	4,73%	75,14%
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	854.712.910		73.057.400	8,55%	100,00%
1	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	854.712.910	1 Dokumen	73.057.400	8,55%	100,00%
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	753.152.800		68.589.400		100,00%
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	753.152.800	5 Dokumen	68.589.400	9,11%	100,00%
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.352.519.800		32.519.600	0,97%	0,56%
1	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	3.268.199.800	0 Dokumen	18.199.700	0,56%	0,56%
2	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	84.320.000	1 Dokumen	14.319.900		
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	65.126.200		38.626.000		100,00%
1	1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	28.420.000	1 Dokumen	28.419.900	100,00%	100,00%
2	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	36.706.200	1 Dokumen	22.206.100	60,50%	100,00%
	2.10.04.2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	244.209.950		224.247.200	91,83%	100,00%
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	244.209.950		224.247.200		
1	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	244.209.950	2 Dokumen	224.247.200	91,83%	100,00%
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	869.655.800		834.205.900	95,92%	100,00%
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	869.655.800				
1	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	869.655.800	4 Laporan	834.205.900	95,92%	100,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari tabel realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran diatas, terlihat bahwa penyerapan anggaran tahun 2021 adalah sebesar 92,70%. Adapun jumlah Penyerapan anggaran Dinas per Program adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran terserap sebesar 87.85%.
2. Program Penyelenggaraan Jalan terserap sebesar 100%.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terserap sebesar 92,64%
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terserap sebesar 95,12%.

Dari program dan kegiatan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021, setelah dilakukan analisis maka didapat bahwa pada akhir tahun 2021, jumlah Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap adalah sepanjang 640,608 Km atau sebesar 87,88% dari total panjang Jalan Kabupaten sepanjang 728,924 Km. dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Rincian pencapaian kegiatan kebinamargaan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Capaian Umum Bidang Kebinamargaan Tahun 2022

NO	TIPE PERMUKAAN	JUMLAH
1.	Pembangunan Jembatan	1 Buah
2.	Pembangunan Jalan	- KM
3.	Peningkatan Jalan	14,045 KM
4.	Pemeliharaan Jalan	50,1 KM
5.	Pemeliharaan Jembatan	4 Titik
6.	Pemeliharaan Gorong-Gorong	33,50 m
7.	Pemeliharaan Trotoar	6 Paket
8.	Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan	7 Lokasi

Secara keseluruhan, dengan terselesaikannya program dan kegiatan yang tertuang dalam penetapan kinerja (Tapkin) Tahun 2021, kondisi Jalan Kabupaten dengan kondisi jalan mantap adalah sepanjang 640.608 kilometer atau sebesar 87,88% dari total panjang jalan kabupaten 728,924 KM. Untuk mengetahui jenis dan kondisi jalan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, seperti diuraikan pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.3 Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2021

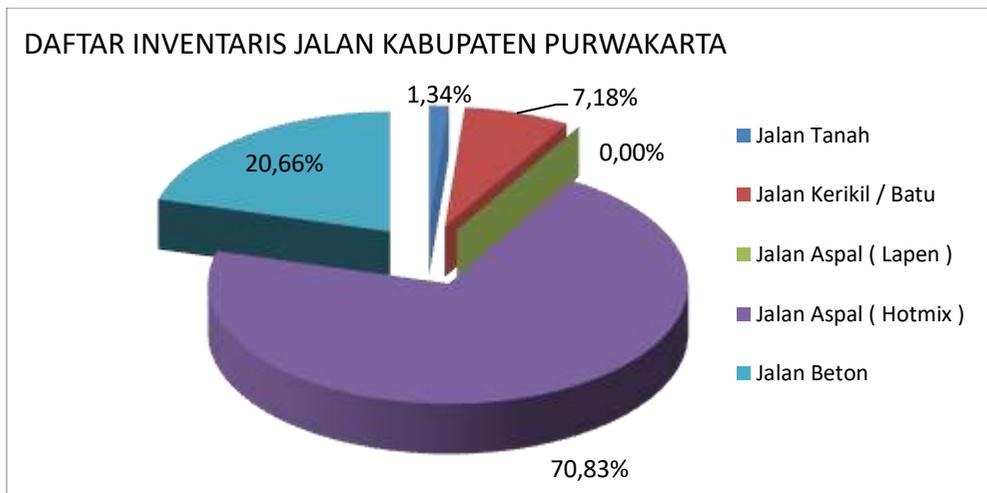
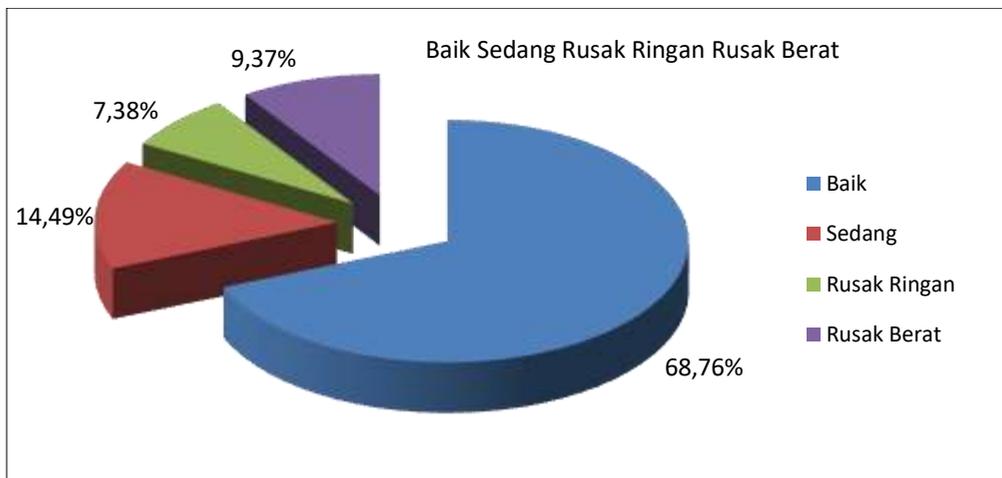
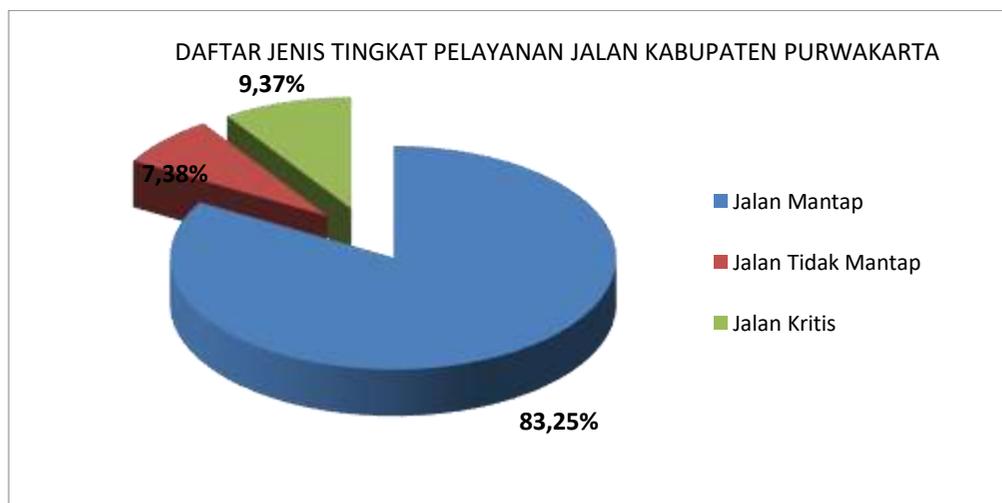
No.	TIPE PERMUKAAN	PANJANG (KM)		
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Jalan Aspal (hotmix)	571,714 (78,43%)	532,161 (73,01%)	516.276 (70.83%)
3.	Jalan Beton	135,825 (18,63%)	136,902 (18,78%)	150.597 (20.66%)
4.	Jalan Batu/Kerikil	21,385 (2,93%)	55,37 (7,60%)	52.315 (7.18%)
5.	Jalan Tanah	-	4,486 (0,62%)	9.736 (1.34%)
JUMLAH			728,924 (100%)	728,924 (100%)

Tabel 2.4 Kondisi Jalan Kabupaten Baik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

No.	KONDISI JALAN	PANJANG (KM)		
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Baik	499,477 (68,52%)	508,554 (69,77%)	501,244 (68.76%)
2.	Sedang	140,482 (19,27%)	132,054 (18,12%)	105,614 (14.49%)
3.	Rusak	83,015 (11,38%)	32,440 (4,45%)	53,770 (7,38%)
4.	Rusak Berat	5,950 (0,81%)	55,876 (7,67%)	68,296 (9,37%)
JUMLAH			728,924	728,924

Tabel 2.5 Kondisi Jalan Kabupaten Mantap di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019-2021

No.	KONDISI JALAN	PANJANG (KM)		
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Mantap	639,959 (87,80%)	640,608 (87,88%)	606,858 (83,25%)
2.	Kurang Mantap	83,015 (11,39%)	32,440 (4,45%)	53,770 (7,38%)
3.	Kritis	5,950 (0,82%)	55,876 (7,67%)	68,296 (9,37%)
JUMLAH		728,924	728,924	728,924

Grafik 2.1 Tipe Permukaan Jalan Kabupaten Tahun 2023**Grafik 2.2** Kondisi Jalan Kabupaten Baik Tahun 2023**Grafik 2.3** Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka memenuhi tersedianya jaringan irigasi yang memadai dari target sebesar 7.270,00 Ha daerah dengan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 5.974,62Ha artinya realisasi kinerja bidang pengairan sebesar 82,18% terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Tapkin 2022. Untuk melihat capaian bidang pengairan dan kondisi irigasi pada akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Sedangkan hasil realisasi K1 untuk Jalan atau irigasi tahun 2023 belum ada karena masih berjalan. Hasilnya akan tersedia pada bulan Februari-Maret tahun 2024.

Tabel 2.6 Capaian Umum Bidang Pengairan Tahun 2022

NO.	KONDISI JEMBATAN	JUMLAH
1.	Rehabilitasi Lining	7503,25 m
2.	Rehabilitasi Bendung	-
3.	Bangunan Box Bagi	14
4.	Free Intake	5
5.	Krib Bronjong	77 m

Tabel 2.7 Kondisi Umum Irigasi Tahun 2022

NO	KONDISI IRIGASI	HEKTAR	PROSENTASE (%)
1.	Baik	6158,55Ha	84,71%
2.	Sedang	602,77Ha	8,29%
3.	Rusak Berat	508,68 Ha	7%
JUMLAH		7.270,00 Ha	100%

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas terlihat bahwa prosentase kondisi irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 84,71%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur tersebut dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan.

Selain itu, isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius adalah pentingnya seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang mendukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.

Untuk itu perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya tantangan dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga

- Peningkatan Kinerja dan profesionalisme di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan jaringan jalan dan jembatan;
- Peningkatan daya dukung, kapasitas, maupun kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- Pembangunan jalan dan jembatan baru untuk meningkatkan aksesibilitas;
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara jalan dan jembatan.
- Peningkatan Kinerja dan profesionalisme para perencanaan dibidang perencanaan jalan dan jembatan;
- Peningkatan kualitas SDM dibidang Perencanaan jalan dan jembatan;

2. Isu Strategis Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Jaringan jalan strategis masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah, khususnya jalan lingkaran timur dan jalan lingkaran barat Kabupaten Purwakarta;
- Masalah pembebasan lahan yang sering terjadi menjadi hambatan bagi pembangunan jalan;

- Meningkatkan mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan ditengah keterbatasan alokasi anggaran untuk penanganan jaringan jalan;
- Beban Kendaraan berlebih masih sering terjadi di ruas jalan kabupaten;
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dan jembatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang meliputi pemantapan jaringan jalan kabupaten;

B. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

1. Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga Dan Pengairan

- Peningkatan Kinerja dan profesionalisme di bidang penyelenggaraan pengairan;
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan jaringan irigasi;
- Menjaga kontinuitas pemenuhan debit minimal untuk seluruh daerah irigasi tersier;
- Menjaga kelebihan penggunaan air dengan cara menjaga tingkat pemenuhan debit minimal untuk daerah-daerah irigasi tersier;
- Masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- Peningkatan Kinerja dan profesionalisme para perencanaan dibidang pengairan;
- Peningkatan kualitas SDM dibidang Perencanaan irigasi;

3 Isu Strategis Bidang Pengairan/ irigasi

- Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, yang diakibatkan oleh adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain disebabkan oleh umur kontruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur irigasi yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor;
- Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air akibat berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas penampungan air baik alamiah maupun buatan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun setelah mendapatkan masukan dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta sebagai gambaran awal rencana kerja Kepala Daerah selama satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan kebijakan daerah dan permasalahan spesifik yang dihadapi. Disamping itu Rancangan awal RKPD mencakup usulan hasil kegiatan musrenbang dan rancangan awal Rencana Kerja OPD di seluruh Kabupaten Purwakarta.

Terhadap RKPD ini selanjutnya perlu dilakukan telaah lebih lanjut untuk menselaraskan berbagai kepentingan dan kebutuhan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan mempertimbangkan dan mengakomodir amanat kebijakan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang baik dari tingkat nasional atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang maupun kebijakan Provinsi Jawa Barat.

Hal ini juga perlu dilakukan untuk mengatur strategi pengalokasian dana yang tersedia dari berbagai sumber baik APBN, Bantuan Gubernur, maupun APBD Kabupaten dengan memperhatikan strategi untuk mendapatkan *protective benefit* dan *positive benefits* sehingga dapat terhindar dari kemungkinan tidak teranggarkannya suatu kegiatan karena pengalokasian sumber dan waktu perencanaan yang kurang tepat.

Disamping itu pula dengan mempertimbangkan kemungkinan dapat atau tidak dapat terlaksananya suatu kegiatan karena sumber daya manusia dan sarana prasarannya. Dengan demikian dapat dipilah program atau kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan, karena tidak seluruh usulan yang disampaikan merupakan kebutuhan.

Tabel TC. 31
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Purwakarta

No	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Pagu Indikatif	Keluaran	Kebutuhan Dana
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	DINAS DEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		149.056.973.253		196.876.512.236
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Purwakarta	34.212.954.120		42.437.697.001
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	122.500.000	4 Dokumen	180.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purwakarta	13.285.000.000	14 bulan	17.001.384.973
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purwakarta	40.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Purwakarta	80.000.000	1 Dokumen	40.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purwakarta	1.065.000.000	0 Paket 265 stel 265 stel	1.555.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta	1.410.000.000	30 Item	2.275.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	6.185.000.000	1 Unit mobil 7 Unit motor	13.251.312.028
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purwakarta	4.883.423.595	0 Laporan 300 lembar	5.715.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purwakarta	2.139.000.000	20 Unit	2.320.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Purwakarta	13.440.558.916		22.730.000.000
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	2.100.000.000	1 Dokumen	1.230.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	14.334.000.000	4 UPTD	21.500.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Purwakarta	2.740.654.843		5.570.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	2.740.654.843	0 Dokumen	5.570.000.000
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Purwakarta	35.404.762.513		29.100.000.000

	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Purwakarta	35.404.762.513	3 Dokumen	29.100.000.000
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Purwakarta	9.485.954.238		270.000.000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	9.485.954.238	5 Dokumen	270.000.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Purwakarta	337.759.133		750.000.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Purwakarta	337.759.133	20 Orang	525.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	-	1 Dokumen	225.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional	Purwakarta	100.000.000	1 Dokumen	-
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Purwakarta	50.231.243.579		91.490.000.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Purwakarta	50.231.243.579	20 Dokumen	91.490.000.000
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Purwakarta	2.270.036.253		3.278.815.235
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Purwakarta	1.312.999.800	0 Dokumen 2 Sub Kegiatan	2.065.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	50.000.000	0 Dokumen 2 Sub Kegiatan	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta		0 Dokumen 1 Paket	733.815.235
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta		0 Dokumen 2 Sub Kegiatan	480.000.000
9	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Purwakarta	83.049.658		400.000.000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	83.049.658	0 Dokumen 1 Paket	400.000.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Purwakarta	850.000.000		850.000.000
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Purwakarta	850.000.000	0 Dokumen 3 Lokasi	850.000.000
11	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Purwakarta	-		869.655.800
	Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah Kosong	Purwakarta	-	1 Dokumen	869.655.800

Berdasarkan review terhadap rancangan awal dan analisis kebutuhan, maka belum semua kebutuhan dapat terpenuhi mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kegiatan. Selain itu adanya kegiatan baru yang belum masuk pada rancangan awal, disebabkan adanya prioritas dan kebijakan baru baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Hal ini juga masih kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan proses pembahasan KUA PPAS dan penetapan APBD Kabupaten Purwakarta.

Berbagai pengaruh dan faktor lainnya mempengaruhi juga terhadap belum terpenuhinya kebutuhan minimal pelayanan bidang Jalan, Irigasi dan Drainase. Sedangkan kesesuaian antara rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan menunjukkan adanya kesesuaian, hal ini karena telah memperhitungkan keterbatasan dan kemampuan permasalahan di atas.

Namun untuk memecahkan seluruh permasalahan dan menjawab tantangan bidang Infrastruktur dimasa depan maka diperlukan analisis lebih lanjut dan dukungan dan advokasi yang kuat dengan stakeholder terkait. Selain itu dalam penyusunan rencana kerja Tahun 2024 dengan memperhatikan dan mengsinergikan dengan usulan internal Dinas PUTR. Adapun usulan dari luar Dinas PUTR antara lain Aspirasi Masyarakat dan Pokok Pikiran wakil rakyat DPRD Kabupaten Purwakarta. Adapun usulan tersebut sudah diakomodir pada tabel di bawah ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Dengan memperhatikan berbagai usulan yang dikumpulkan baik dari masyarakat maupun pemangku kebijakan dari berbagai stakeholder serta aspirasi masyarakat melalui kunjungan lapangan, forum musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, maupun usulan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat maka hasil-hasil tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas PUTR. Dalam penyerapan aspirasi maka Dinas PUTR membentuk dan menyebarkan tim pemantau untuk mengikuti jalannya musrenbang. Hasil musrenbang tersebut digunakan untuk menyusun Rancangan Renja Dinas PUTR.

Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam forum SKPD lintas sektor termasuk usulan musrenbang, usulan anggota Dewan yang menjadi masukan dalam penyesuaian rancangan RenjaSKPD dan penyusunan rancangan awal RKPD oleh Bappelitbangda yang selanjutnya menjadi acuan penetapan program dan kegiatan dalam menyusun Renja SKPD.

Musrenbang kabupaten dilanjutkan dengan Musrenbang provinsi dan Musrenbang nasional. Dinas PUTR melakukan kajian informasi berbagai usulan tersebut. Usulan kegiatan yang diakomodir adalah kegiatan yang memiliki kesesuaian dan terkait dengan isu penting penyelenggaraan tupoksi dan kewenangan Dinas PUTR.

Yang menjadi pertimbangan penentuan program, kegiatan maupun anggaran diantaranya adalah :

- a. program/kegiatan yang lanjutan;
- b. program/kegiatan yang menyokong kebijakan nasional dan provinsi;
- c. program/kegiatan sesuai arahan rancangan awal RKPD; dan
- d. program/kegiatan prioritas hasil analisis kebutuhan.

Usulan dan Aspirasi masyarakat juga ditampung oleh anggota dewan yang merupakan representasi mereka di Parlemen. Usulan kegiatan yang diakomodir adalah kegiatan yang memiliki kesesuaian dan terkait dengan isu penting penyelenggaraan tupoksi dan kewenangan Dinas PUTR.

Berikut adalah daftar Aspirasi Masyarakat yang disampaikan melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta melalui jalur Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.

Table 3.2 (TC-32) Usulan Program dan kegiatan Tahun 2024 dari para pemangku Kepentingan dan Aspirasi Masyarakat

NO	PERMASALAHAN	LOKASI	ASUMSI	PENGUSUL
1	banyaknya jalan berlubang berbahaya untuk pengguna jalan	(Ruas Jalan Plered-Warung Jeruk, Plered)	3 KM	DIAS RUKMANA PRAJA, SE
2	jalan banyak berlubang sudah hampir 10 tahun tidak ada perbaikan jalan secara berkala	(Ruas Jalan Cilangkap-Gandasoli, Gandasoli, Kec. Plered)	perbaikan 3 KM	DIAS RUKMANA PRAJA, SE
3	Kondidi saluran irigasi rusak	(Desa Cibogohilir, Cibogohilir, Kec. Plered)	-	DIAS RUKMANA PRAJA, SE
4	Kondisi Saluran drainase Jalan kabupaten rusak	(Desa Gandasoli, Gandasoli, Kec. Plered)	3 km	DIAS RUKMANA PRAJA, SE
5	Kondisi Saluran Drainase rusak	(Desa Plered, Plered)	3 Km	DIAS RUKMANA PRAJA, SE
6	kondisi saluran irigasi rusak	(Desa Pasirjambu, Pasirjambu, Kec. Maniis)	200 M	DIAS RUKMANA PRAJA, SE
7	kondisi saluran irigasi rusak	(desa Batu tumpang, Batutumpang, Kec. Tegalwaru)	200 M	DIAS RUKMANA PRAJA, SE
8	banyak jalan yang berlubang /rusak	(ruas jalan beton penghubung Ciparungsari - Cisaat, Ciparungsari, Kec. Cibatu)	3 KM	H. AHMAD SANUSI
9	Jalan kabupaten Rusak	(Kp. cireok Rw 01, Cijaya, Kec. Campaka)	-	H. AHMAD SANUSI
10	jalan rusak	(Rt 09/02, Campaka)	300 M	H. AHMAD SANUSI
11	jalan rusak	(Kp cikuda Rt 5,6,7 Rw 02, Karyamekar, Kec. Cibatu)	700 meter	H. AHMAD SANUSI
12	jalan rusak	(Rt 01/01 Cipinang, Rt 05,06,02,2 Cikadu, Cipinang, Kec. Cibatu)	2 km	H. AHMAD SANUSI
13	jalan rusak	(Kp. bongas Rt 03 Rw 04, Cilandak, Kec. Cibatu)	700 M	H. AHMAD SANUSI
14	Jalan rusak	(Rt 01 Rw 01, Campakasari, Kec. Campaka)	800 Meter	H. AHMAD SANUSI
15	Jalan rusak	(Rt 01 Rw 01, Campakasari, Kec. Campaka)	800 Meter	H. AHMAD SANUSI
16	jalan rusak banyak yang berlubang	(ruas jalan sempur - Cipancur, Cipancur, Kec. Cibatu)	-	H. AHMAD SANUSI
17	jalan rusak banyak yang berlubang	(Rt 04/02, Cipancur, Kec. Cibatu)	-	H. AHMAD SANUSI
18	Jalan rusak banyak yg berlubang	(ruas jalan wanasari, Cibukamanah, Kec. Cibatu)	300 Meter	H. AHMAD SANUSI
19	jalan yang rusak	(Ruas jalan Cipancur - babakan, Cipancur, Kec. Cibatu)	300 m	H. AHMAD SANUSI
20	Jembatan yang rusak	(Kp. Cikalongpanjang RT 09/02, Cirangkong, Kec. Cibatu)	6 m	H. AHMAD SANUSI
21	kondisi jalan kabupaten rusak	(Desa Cirangkong, Cirangkong, Kec. Cibatu)	4 Km	H. AHMAD SANUSI
22	Kondisi saluran irigasi rusak	(Rt 06, 07 Rw 03, Cisaat, Kec. Campaka)	400 M	H. AHMAD SANUSI
23	rusaknya jalan kabupaten	(Desa Cijaya, Cijaya, Kec. Campaka)	600 Meter	H. AHMAD SANUSI
24	Rusaknya TPT Jalan Kabupaten	(Kp. Duren, Cijaya, Kec. Campaka)	Panjang 150 Tinggi 2,5 M	H. AHMAD SANUSI
25	Saluran Irigasi Blok Cijanggot rusak	(Desa Cipinang, Cipinang, Kec. Cibatu)	2 KM	H. AHMAD SANUSI

26	saluran irigasi cireok rusak	(Rw 01, Cijaya, Kec. Campaka)	-	H. AHMAD SANUSI
27	saluran irigasi dan tanggul Ciparana rusak	(Kp Babakan RT 001 Rw 001, Benteng, Kec. Campaka)	1 KM	H. AHMAD SANUSI
28	Saluran irigasi rusak	(Rt 08 Rw 04, Campaka)	500 M	H. AHMAD SANUSI
29	saluran irigasi situ Cikumpay yang rusak	(Rw 03, Cikumpay, Kec. Campaka)	-	H. AHMAD SANUSI
30	saluran irigasi wilayah Kp. Sukasari rusak	(Kp Sukasari Rt 09 Rw 03, Karyamekar, Kec. Cibatu)	300 Meter	H. AHMAD SANUSI
31	saluran irigasi yang rusak Jalan pasar minggu - Jatimulya	(Rw 02, Cikumpay, Kec. Campaka)	-	H. AHMAD SANUSI
32	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Kp Krajan RT/003 Rw/002 Desa Situ, Pondoksalam)	Anggaran Rp. 500.000.000	H. AHMAD SUMINTA SUTJANA, BE
33	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Kp Krajan Rt/06 Rw/02 Desa Situ, Pondoksalam)	Anggaran Rp 1.500.000.000	H. AHMAD SUMINTA SUTJANA, BE
34	jalan kabupaten rusak dan bergelombang	(Desa Cibingbin, Cibingbin, Kec. Bojong)	1500 Meter	H. OJA SUTISNA
35	Jalan rusak menuju pasirmunjul sepanjang 2km	(jalan gg. asem/ cibodas menuju pasirmunjul (hidden valley), Cianjing Utara, Kec. Sukatani)	Rp. 700.000.000	HIDAYAT S. Thi
36	Kondisi Bendung Sungai Cikao rusak	(Desa Pawenang, Pawenang, Kec. Bojong)	-	Hj. ENAH ROHANAH
37	kondisi saluran irigasi DI Pawenang rusak	(Desa Pawenang, Pawenang, Kec. Bojong)	-	Hj. ENAH ROHANAH
38	Saluran Drainase Jalan kabupaten Jalan Nagrak rusak	(Desa Nagrak, Nagrak, Kec. Darangdan)	-	Hj. ENAH ROHANAH
39	Saluran drainase Jalan Kabupaten ruas jalan Linggasari - Pasanggrahan rusak	(Desa Linggasari, Linggasari, Kec. Plered)	-	Hj. ENAH ROHANAH
40	saluran drainase jalan Kabupaten rusak	(Desa Nangewer, Nangewer, Kec. Darangdan)	-	Hj. ENAH ROHANAH
41	saluran drainase Jalan kabupaten Rusak	(Desa cikeris, Cikeris, Kec. Bojong)	-	Hj. ENAH ROHANAH
42	Saluran drainase Jalan kabupaten rusak	(Desa Cilingga, Cilingga, Kec. Darangdan)	270 meter	Hj. ENAH ROHANAH
43	Saluran drainase Jalan kabupaten rusak	(Desa Cikeris, Cikeris, Kec. Bojong)	270 meter	Hj. ENAH ROHANAH
44	Saluran drainase Jalan kabupaten rusak	(Desa Linggasari, Linggasari, Kec. Plered)	270 Meter	Hj. ENAH ROHANAH
45	Saluran drainase Jalan kabupaten rusak	(Desa Nagrak, Nagrak, Kec. Darangdan)	200 meter	Hj. ENAH ROHANAH
46	Saluran drainase Jalan kabupaten rusak	(Desa Cikeris, Cikeris, Kec. Bojong)	-	Hj. ENAH ROHANAH
48	Saluran Drainase Jalan Kabupaten rusak	(Desa Cilingga, Cilingga, Kec. Darangdan)	270 meter	Hj. ENAH ROHANAH
49	Rusaknya saluran drainase jalan kabupaten	(Desa Kutamanah, Kutamanah, Kec. Sukasari)	500 Meter	PUTRIARTI PUTIK H, SE
50	Rusaknya saluran drainase jalan kabupaten	(Desa Cilalawi, Cilalawi, Kec. Sukatani)	500 Meter	PUTRIARTI PUTIK H, SE

51	Rusaknya saluran Drainase Jalan Kabupaten	(Desa Cijantung, Cijantung, Kec. Sukatani)	250 Meter	PUTRIARTI PUTIK H, SE
52	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Kp. Galumpit Rt06/03, Galumpit, Kec. Tegalwaru)	-	RAHMAN ABDURRAHMAN, S.Pd
53	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Rt 09/05, Galumpit, Kec. Tegalwaru)	-	RAHMAN ABDURRAHMAN, S.Pd
54	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Kp. cibeurih RT 07/04, Galumpit, Kec. Tegalwaru)	-	RAHMAN ABDURRAHMAN, S.Pd
55	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Kp. galumpit Rt 06/03, Galumpit, Kec. Tegalwaru)	-	RAHMAN ABDURRAHMAN, S.Pd
56	Jalan Kabupaten Penghubung Kecamatan Bojong dan Kecamatan Pondoksalam perlu perbaikan	(Desa Sindangpanon dan Desa Pawenang, Sindangpanon, Kec. Bojong)	Anggran Rp. 3000.000.000	ZAENAL ARIFIN
57	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Rt 04 01 dan 05, Raharja, Kec. Wanayasa)	supaya aliran air menjadi lancar	YULIAN IRSYFRI. S.M
58	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Rt 01, Raharja, Kec. Wanayasa)	-	YULIAN IRSYFRI. S.M
59	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Kp. Awimekar RT 12/RW 06 Desa Bungursari Kec. Bungursari, Bungursari, Kec. Bungursari)		SRI PUJI UTAMI
60	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Desa Cibungur Kec. Bungursari, Cibungur, Kec. Bungursari)	-	SRI PUJI UTAMI
61	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Desa Cikadu-Desa Cipancur, Cilaku)	-	SRI PUJI UTAMI
62	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Desa Cirende kec. Campaka, Cirende, Kec. Campaka)	-	SRI PUJI UTAMI
63	peningkatan jalan dan perbaikan drainase desa kadumekar kp. cikadu kecamatan babakancikao	(Kadumekar, Kec. Babakancikao)		CONRAD SURAWIJAYA
64	Peningkatan jalan kp sadang- ciwareng kec babakan cikao	(Mulyamekar, Kec. Babakancikao)	-	CONRAD SURAWIJAYA
65	perbaikan jalan lingkungan (gg panasaran, babakanjati, pasirangka) ds marancang, kec. babakancikao	(Marancang, Kec. Babakancikao)	-	CONRAD SURAWIJAYA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Periode tahun 2024-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, sehingga merupakan awal periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting untuk memulai rencana menuju Indonesia emas di tahun 2045.

RPJMN 2024-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJMN 2024-2029, sasaran pembangunan jangka menengah adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PUPR

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penetapan tujuan secara umum di dasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan semua program dan kegiatan, agar dalam pelaksanaannya terjalin sinergitas dengan misi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan Prioritas Tujuan Dinas **“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dengan fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang dimilikinya.

Dalam rangka menunjang operasionalisasi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasarannya adalah: **“MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGEMBANGAN WILAYAH”**.

Atas dasar hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah pula menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Indikator Tujuan :

1. Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan Target : 95,00%
2. Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan Target : 85,00%
3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier Target : 84.71%
4. Terwujudnya Jumlah Bangunan Gedung dan ruang publik yang dibangun dan direvitalisasi Target : 100%
5. Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi gedung milik Pemerintah dan gedung untuk fasilitas publik Target : 15 Unit

Sasaran :

Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap

Indikator Sasaran :

Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan

Sasaran :

Meningkatnya Pengelolaan Pengairan

Indikator Sasaran :

Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik

Indikator Sasaran :

Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/dibangun

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah

Indikator Sasaran :

Terlaksananya penyelenggaraan tata ruang daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Tahun ke				
				2024	2025	2026	2027	2028
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dukungan Manajemen Perkantoran Dalam Penyelenggaraan Jalan Dan Pengairan	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	95	95	9\85		
	Terwujudnya Pemeliharaan Dalam Penanganan Jalan	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Pemeliharaan dan Pembangunan dalam penanganan Jalan	85.00 %	85.00 %	85.00 %		
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Air di Seluruh Daerah Irigasi Tersier	Meningkatnya Pengelolaan Pengairan	Partisipatif masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi		32.56 %	35.06 %		
	Terwujudnya Jumlah Bangunan Gedung dan ruang publik yang dibangun dan direvitalisasi	Meningkatnya Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik	Jumlah Bangunan dan Ruang Publik yang direvitalisasi/ dibangun	2,000	2,000	2,000		
	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan tata ruang daerah Kabupaten/Kota	100	100	100		

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Tingkat Nasional. Rencana kerja yang dibuat mengacu pada RPD Kabupaten Purwakarta 2024–2026 serta sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta.

Pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan ditetapkan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen meningkatkan derajat Pekerjaan Umum dan Tata Ruang masyarakat secara optimum dengan segala sumberdaya yang ada.

Pada tahun 2024 mengalami perubahan terkait nomenklatur program dan kegiatan serta adanya menu sub kegiatan pada nomenklatur kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Hal ini mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan serta KepMendagri Nomor 900-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Tabel Tabel 3.3 (TC. 33)

Rencana Kerja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju di tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur		Target	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				196.926.			208.765.012.236,0	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				195.626.			202.465.012.236,0	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				195.626.			202.465.012.236,0	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				42.437.6			42.471.197.001,00	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				180.000.			180.000.000,00	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BB Predikat	2.00 Dokumen	20 Dokumen	40.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	40.000.000,00
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	15.000.000,00
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1.00 Dokumen	15.000.000,00
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	15.000.000,00
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1.00 Dokumen	15.000.000,00
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Laporan	20 Dokumen	40.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1.00 Laporan	40.000.000,00
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Laporan	20 Dokumen	40.000.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan	40.000.000,00

1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							17.001.3				16.989.884.973,00
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BB Predikat	98/14 Orang/bulan	100 %	16.846.384.973,0	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98/14 Orang/bulan				16.846.384.973,00
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BB Predikat	1 Dokumen	100 %	65.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen				65.000.000,00
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BB Predikat	2 Dokumen	100 %	12.500.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	2 Dokumen				0,00
1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BB Predikat	4 Dokumen	100 %	12.500.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen				12.500.000,00
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BB Predikat	1 Laporan	100 %	20.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan				21.000.000,00
1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BB Predikat	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	1 Dokumen				10.000.000,00
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BB Predikat	4 Laporan	100 %	10.000.000,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan				10.000.000,00
1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BB Predikat	2 Dokumen	100 %	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	2 Dokumen				25.000.000,00
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											100.000.000,00
1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BB Predikat	1 Dokumen	100 %	30.000.000,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen				30.000.000,00
1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BB Predikat	6.00 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.00 Dokumen				20.000.000,00
1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BB Predikat	1 Laporan	100 %	20.000.000,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				20.000.000,00
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BB Predikat	1 Laporan	100 %	30.000.000,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				30.000.000,00

1	03	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					40.000.0			30.000.000,00
1	03	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	BB Predikat	1.00 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1.00 Dokumen	10.000.000,00
1	03	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah								
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	BB Predikat	1.00 Laporan	100 %	10.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	1.00 Laporan	0,00
1	03	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah								
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Laporan	100 %	10.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1.00 Laporan	10.000.000,00
1	03	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	BB Predikat	4 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.555.00			1.590.000.000,00
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BB Predikat	145 Stel Paket	100 %	450.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145 Stel Paket	450.000.000,00
1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1.00 Dokumen	20.000.000,00
1	03	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Dokumen	100 %	35.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.00 Dokumen	35.000.000,00
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BB Predikat	3.00 Orang	100 %	300.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3.00 Orang	315.000.000,00
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BB Predikat	50 Orang	100 %	400.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	50 Orang	420.000.000,00
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BB Predikat	50 Orang	100 %	350.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	350.000.000,00

1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2.275,00				2.295.000.000,00
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Paket	100 %	150.000.000,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		150.000.000,00		
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Paket	100 %	200.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		200.000.000,00		
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Paket	100 %	200.000.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00 Paket		200.000.000,00		
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Paket	100 %	400.000.000,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		420.000.000,00		
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	BB Predikat	1 Paket	100 %	200.000.000,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		200.000.000,00		
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Paket	100 %	50.000.000,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 Paket		50.000.000,00		
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Laporan	100 %	50.000.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.00 Laporan		50.000.000,00		
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	BB Predikat	1 Laporan	100 %	700.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		700.000.000,00		
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Dokumen	100 %	25.000.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.00 Dokumen		25.000.000,00		
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Dokumen	100 %	300.000.000,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00 Dokumen		300.000.000,00		
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								13.251.312.028,00			13.251.312.028,00
1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Predikat	4.00 Unit	100 %	1.500.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4.00 Unit		1.500.000.000,00		
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Predikat	3 Unit	100 %	3.000.000.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		3.000.000.000,00		

1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar								
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Predikat	2.00 Unit	100 %	5.251.312.028,00	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2.00 Unit	5.251.312.028,00
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Predikat	33 Unit	100 %	200.000.000,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	200.000.000,00
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Predikat	65 Unit	100 %	1.500.000.000,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit	1.500.000.000,00
1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Predikat	2.00 Unit	100 %	800.000.000,00	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.00 Unit	800.000.000,00
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Predikat	1 Unit	100 %	600.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	600.000.000,00
1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BB Predikat	4 Unit	100 %	400.000.000,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	400.000.000,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.715.000.000,00			5.715.000.000,00
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Laporan	100 %	15.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	15.000.000,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	BB Predikat	12 Bulan Laporan	100 %	550.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan Laporan	550.000.000,00
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	BB Predikat	1.00 Laporan	100 %	150.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan	150.000.000,00
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	BB Predikat	144 Orang/1Tahun Laporan	100 %	5.000.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144 Orang/1Tahun Laporan	5.000.000.000,00

1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.320.000.000,00			2.320.000.000,00		
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB Predikat	23 Unit	100 %	450.000.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	450.000.000,00		
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB Predikat	45 Unit	100 %	400.000.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	400.000.000,00		
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar										
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB Predikat	8 Unit	100 %	370.000.000,00	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	370.000.000,00		
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB Predikat	68 Unit	100 %	100.000.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	100.000.000,00		
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB Predikat	4.00 Unit	100 %	800.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00 Unit	800.000.000,00		
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB Predikat	1 Unit	100 %	200.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00		
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					22.730.000.000,00			19.730.000.000,00		
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.230.000.000,00			1.230.000.000,00		
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air										
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	84,71 prosentase 37,60 prosentase	9 Dokumen	7 Subkegiatan	1.230.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	9 Dokumen	1.230.000.000,00		
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					21.500.000.000,00			18.500.000.000,00		

1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	84,71 prosentase 37,60	7.30 KM	9 Sub Kegiatan	6.000.000,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	7.30 KM	5.000.000.000,00
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	84,71 prosentase 37,60	3.45 KM	9 Sub Kegiatan	9.000.000,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3.45 KM	7.000.000.000,00
1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi								
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	84,71 prosentase 37,60	5.00 Bendung	9 Sub Kegiatan	1.000.000,00	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	5.00 Bendung	1.000.000.000,00
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	84,71 prosentase 37,60 prosentase	2.24 KM	9 Sub Kegiatan	1.700.000,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.24 KM	1.700.000.000,00
1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi								
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	84,71 prosentase 37,60	4 Bendung	9 Sub Kegiatan	550.000.000,00	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Bendung	550.000.000,00
1	03	02	2.02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi								
					Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	84,71 prosentase 37,60 prosentase	3.00 DI	9 Sub Kegiatan	850.000.000,00	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	3.00 DI	850.000.000,00
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa								
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	84,71 prosentase 37,60 prosentase	11 Dokumen	9 Sub Kegiatan	2.400.000,00	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	11 Dokumen	2.400.000.000,00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							5.570.000.000,00	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							5.570.000.000,00	
1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan								
					Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	25,00 Prentasse	2.00 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sub Kegiatan	100.000.000,00	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	2.00 Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00

1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan								
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	25,00 Prentasse	5 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sub Kegiatan	2.000.00 0.000,00	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	5 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00
1	03	06	2.01	0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	25,00 Prentasse	10.00 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sub Kegiatan	120.000. 000,00	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	10.00 Sistem Drainase Perkotaan	120.000.000,00
1	03	06	2.01	0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan								
					Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	25,00 Prentasse	1.00 Kawasan Genangan	1 Sub Kegiatan	100.000. 000,00	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1.00 Kawasan Genangan	100.000.000,00
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan								
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	25,00 Prentasse	5 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sub Kegiatan	2.000.00 0.000,00	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	5 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	25,00 Prentasse	3 Dokumen	1 Sub Kegiatan	250.000. 000,00	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	3 Dokumen	250.000.000,00
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan								
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	25,00 Prentasse	265.00 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sub Kegiatan	1.000.00 0.000,00	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	265.00 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								30.100.000.000,00
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								30.100.000.000,00
1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara								
					Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	90,00 Prentasse 95 Prentasse 10.00	20.00 Bangunan Gedung Negara	100 persen	200.000. 000,00	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	20.00 Bangunan Gedung Negara	200.000.000,00
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	90,00 Prentasse 95 Prentasse	11 Bangunan Gedung	100 persen	8.000.00 0.000,00	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	11 Bangunan Gedung	9.000.000.000,00

1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	90,00 Prentasse 95 Prentasse 10,00 Prentasse	3.00 Bangunan Gedung	100 persen	1.200.000.000,00	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3.00 Bangunan Gedung	1.200.000.000,00
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung								
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	90,00 Prentasse 95 Prentasse 10,00 Prentasse	1 Dokumen	100 persen	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	250.000.000,00
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota								
					Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	90,00 Prentasse 95 Prentasse 10,00 Prentasse	3 Bantuan Teknis	100 persen	250.000.000,00	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	3 Bantuan Teknis	250.000.000,00
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah								
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	90,00 Prentasse 95 Prentasse 10,00 Prentasse	20 Dokumen	100 persen	18.000.000.000,00	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	18.000.000.000,00
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung								
					Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	90,00 Prentasse 95 Prentasse 10,00 Prentasse	20 Orang	100 persen	200.000.000,00	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	20 Orang	200.000.000,00
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan								
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	90,00 Prentasse 95 Prentasse 10,00 Prentasse	3.00 Dokumen	100 persen	1.000.000.000,00	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	3.00 Dokumen	1.000.000.000,00
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					270.000.000,00			0,00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					270.000.000,00			0,00
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya	1,00 Prentasse	4 Dokumen	6 Sub Kegiatan	270.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0,00

1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								100.790.000.000,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		7,00 Prentasse 68,00 Prentasse 72,00 Prentasse 83,25 prosentase						100.790.000.000,00
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan								
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		3 Dokumen	12 Sub Kegiatan	840.000.000,00	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3 Dokumen	840.000.000,00
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan								
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		28 Dokumen	12 Sub Kegiatan	3.500.000.000,00	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	28 Dokumen	3.500.000.000,00
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa								
					Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		14.00 KM	12 Sub Kegiatan	1.570.000.000,00	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	14.00 KM	1.570.000.000,00
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan								
					Panjang Jalan yang Dibangun	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		3 KM	12 Sub Kegiatan	5.000.000.000,00	Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	7.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan								
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		21.856 KM	12 Sub Kegiatan	28.000.000.000,00	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	21.856 KM	26.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan								
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		7,515 KM	12 Sub Kegiatan	13.000.000.000,00	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	7,515 KM	22.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa								
					Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		7,515 KM	12 Sub Kegiatan	730.000.000,00	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	7,515 KM	730.000.000,00
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan								
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		6 Jembatan	12 Sub Kegiatan	1.600.000.000,00	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	1.600.000.000,00

1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan								
					Jumlah Jembatan yang Dibangun	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		35.00 Jembatan	12 Sub Kegiatan	10.000.000.000,00	Jumlah Jembatan yang Dibangun	35.00 Jembatan	15.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan								
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		3 Jembatan	12 Sub Kegiatan	1.100.000.000,00	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	3 Jembatan	1.100.000.000,00
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		728,924 KM	12 Sub Kegiatan	900.000.000,00	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	728,924 KM	900.000.000,00
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan								
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		1 KM	12 Sub Kegiatan	8.000.000.000,00	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	8.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan								
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		51,83 KM	12 Sub Kegiatan	17.000.000.000,00	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	51,83 KM	12.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan								
					Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota		1 Jembatan	12 Sub Kegiatan	250.000.000,00	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	1 Jembatan	550.000.000,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						750.000.000,00		525.000.000,00
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						525.000.000,00		525.000.000,00
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi								
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan	95 Prentasse 25,00 Prentasse 50,00 Prentasse	50 Lembaga	50 Orang	320.000.000,00	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	320.000.000,00
1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
					Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan	95 Prentasse 25,00 Prentasse 50,00 Prentasse	1.00 Dokumen	50 Orang	25.000.000,00	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.00 Dokumen	25.000.000,00
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan	95 Prentasse 25,00 Prentasse 50,00 Prentasse	20 Orang	50 Orang	180.000.000,00	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	20 Orang	180.000.000,00

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra- Perangkat Daerah) Tahun 2018 – 2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan urusan Pembangunan dalam bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, Bidang Penataan Ruang. Dengan mengalokasikan Belanja Langsung, untuk kegiatan – kegiatan yang berdasarkan program Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang di sesuaikan dengan prioritas, unggulan dan andalan Daerah dalam rangka mewujudkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, Program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur.

Berikut adalah Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan Rencana Kebutuhan Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dan Indikator Terhadap Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 (TC-34) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 2024 - 2026

KODE	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			PAGU		
								2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2024	2025	2026
IV.													
IV.1	Tujuan : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah												
	Sasaran : Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien												
						Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Km	85	85	85			
						Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100	100			
1.03.10			Program : Penyelenggaraan Jalan										
						Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	84	85	85			
						Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	68	68	68			
						Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	72	71	70			
						Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan	Persen	7	7	7			
						Persentase jembatan yang di	Persen	5	5	5			
1.03.10.2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										
1.03.10.2.01.01					Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
						Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	20	20	20	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
1.03.10.2.01.02					Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan								
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M2	10.000	10.000	10.000	-	-	-
1.03.10.2.01.03					Pengelolaan Leger Jalan								
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	1	1	1	840.000.000	850.000.000	900.000.000
1.03.10.2.01.04					Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	2	2	2	900.000.000	900.000.000	900.000.000
1.03.10.2.01.05					Pembangunan Jalan								
						Panjang Jalan yang Dibangun	KM	0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000
1.03.10.2.01.08					Rekonstruksi (Peningkatan) Jalan								
						Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	20	20	20	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
1.03.10.2.01.10					Pemeliharaan Berkala Jalan								
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	15	15	15	20.000.000.000	21.000.000.000	22.000.000.000
1.03.10.2.01.11					Pemeliharaan Rutin Jalan								
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	20	20	20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
1.03.10.2.01.12					Pembangunan Jembatan								
						Panjang Jembatan yang Dibangun	M	35	35	35	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
1.03.10.2.01.17					Pelebaran Jembatan								
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	M	15	15	15	250.000.000	250.000.000	250.000.000

1.03.10.2.01.19				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	110	110	110	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
1.03.10.2.01.20				Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M	50	50	50	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
1.03.10.2.01.21				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	M	100	100	100	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
1.03.10.2.01.22				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	1	1	1	730.000.000	730.000.000	730.000.000
1.03.10.2.01.23				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	1	1	1	1.570.000.000	1.570.000.000	1.570.000.000
1.03.02				Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)								
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	37,6	37,6	37,6			
					Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	84,71	84,71	84,71			
1.03.02.2.01				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.02.2.01.01				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi bendungan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	4	4	4	1.230.000.000	1.250.000.000	1.270.000.000
1.03.02.2.02				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1								
1.03.02.2.02.01				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	8	8	8	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
1.03.02.2.02.02				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	M	700	700	700			
1.03.02.2.02.03				Pembangunan Bendung Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	3,59	4,06	4,59			
1.03.02.2.02.08				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	3,42	3,87	4,38	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
1.03.02.2.02.14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	20	20	20	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
1.03.02.2.02.15				Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	5	5	5	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

1.03.02.2.02.21				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	4	4	4	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
1.03.02.2.02.22				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi								
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	8	8	8	550.000.000	600.000.000	650.000.000
1.03.02.2.02.28				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi								
					Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI	3	3	3	850.000.000	850.000.000	850.000.000
IV.1.2	Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien											
1.03.06	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase											
					Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Persen	25	25	25			
1.03.06	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											
1.03.06.2.01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								
1.03.06.2.01					Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	1	1	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.03.06.2.02				Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan								
					Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.03.06.2.03				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan								
					Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.03.06.2.04				Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan								
							1	1	1	120.000.000	120.000.000	120.000.000
1.03.06.2.06				Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan								
					Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	M	700	700	700	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
1.03.06.2.07				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan								
					Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	335	335	335	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
1.03.06.2.09				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase								
					Panjang Sistem Drainase yang Dipelihara	M	265	265	265	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03.08	Program : Penataan Bangunan Gedung											
					Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100	100			
					Tingkat bangunan gedung daerah yang dibangun dan direhab	Persen	10	10	10			
					Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara	Persen	90	90	90			

1.03.08.2.01				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
1.03.08.2.01.01				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG								
					Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	1	1	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.03.08.2.01.02				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12	18.000.000.000	19.000.000.000	20.000.000.000
1.03.08.2.01.03				Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota								
					Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	2	2	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.03.08.2.01.04				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.08.2.01.04					Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	250.000.000	250.000.000	250.000.000
1.03.08.2.01.05				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.03.08.2.01.11				Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi								
					Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Unit	20	20	20	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.03.08.2.01.12				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	10	10	10	9.000.000.000	9.700.000.000	11.000.000.000
1.03.08.2.01.13				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	3	3	3	1.200.000.000	1.200.000.000	120.000.000
1.03.09				Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya								
					Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persen						
1.03.09.2.01				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.09.2.01.01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota								

1.03.11		Program : Pengembangan Jasa Konstruksi										
					Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	25	25	25			
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	0,1	0,1	0,1			
					Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil	Persen	50	50	50			
1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										
1.03.11.2.01.03				Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								
					Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Dokumen	1	1	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.03.11.2.01.04				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	30	30	30	180.000.000	180.000.000	180.000.000
1.03.11.2.01.07				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi								
					Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	35	35	35	320.000.000	320.000.000	320.000.000
1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi										
1.03.11.2.01.03				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	1	1	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.03.11.2.01.03				Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	1	1	1	125.000.000	125.000.000	125.000.000
1.03.12		Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang										
					Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		20	20	20			
					Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		55	55	55			
					Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100	100	100			
1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										
1.03.12.2.01.01				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota								
					Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	700.000.000	700.000.000	700.000.000
1.03.12.2.01.02				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota								
					Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	5	750.000.000	750.000.000	750.000.000

				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota									
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota								
							1	1	1	880.000.000	880.000.000	880.000.000	
1.03.12.2.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									
1.03.12.2.03.01					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	143.815.235	168.036.264	385.172.959
1.03.12.2.03.02					Sistem Informasi Penataan Ruang								
						Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	325.000.000	325.000.000	325.000.000
1.03.12.2.04				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									
1.03.12.2.04.01					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.03.12.2.04.01					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	4	4	5	280.000.000	280.000.000	280.000.000
2.10.05				Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan									
								100	100	100			
2.10.05.2.01				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.10.05.2.01.02					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	5.050.000.000	5.050.000.000	5.050.000.000
2.10.08				Program : Pengelolaan Tanah Kosong									
2.10.08.2.02				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong									
2.10.08.2.02.01					Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong								
						Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	1	1	1	850.000.000	850.000.000	850.000.000

V.1.1		Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
1.04.01		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
			SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A				
1.04.01.2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A				
1.04.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	5	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
1.04.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4	4	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
1.04.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	4	4	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
1.04.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	8	8	8	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
1.04.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	5	5	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
1.04.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
1.04.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3	3	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
1.04.01.2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
			SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A				
1.04.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	65	65	65	16.846.384.973	16.846.384.973	16.846.384.973	
1.04.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	5	5	65.000.000	65.000.000	65.000.000	
1.04.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5	5	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
1.04.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	5	5	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
1.04.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	5	5	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
1.04.01.2.02.06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	5	5	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
1.04.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	5	5	5	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
1.04.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	20	20	20	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
1.04.01.2.03		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
				Predikat	A	A	A				
1.04.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		6	6	6	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
1.04.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6	6	20.000.000	20.000.000	20.000.000	

1.04.01.2.04			Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
						Predikat	A	A	A			
1.04.01.2.04.01			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	6	6	6	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
1.04.01.2.04.03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah									
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	6	6	6	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
1.04.01.2.04.05			Pengolahan Data Retribusi Daerah									
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6	6	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
1.04.01.2.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
1.04.01.2.05			Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
				SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A				
1.04.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	450.000.000	450.000.000	450.000.000	
1.04.01.2.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
1.04.01.2.05.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
1.04.01.2.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				300.000.000	300.000.000	300.000.000	
1.04.01.2.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	3	3	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
1.04.01.2.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	3	3	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
1.04.01.2.06			Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A				
1.04.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
1.04.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
1.04.01.2.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
1.04.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
1.04.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20000	20000	20000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
1.04.01.2.06.07			Penyediaan Bahan/Material									
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
1.04.01.2.06.08			Fasilitas Kunjungan Tamu									
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
1.04.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

1.04.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	18	18	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.04.01.2.07.09				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	800.000.000	800.000.000	800.000.000
1.04.01.2.07.10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	600.000.000	600.000.000	600.000.000
1.04.01.2.07.11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.04.01.2.08				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
					SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A			
1.04.01.2.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	500	500	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.04.01.2.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	550.000.000	550.000.000	550.000.000
1.04.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.04.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
1.04.01.2.09				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A			
1.04.01.2.09.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	20	20	450.000.000	450.000.000	450.000.000
1.04.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	35	35	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.04.01.2.09.03				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	4	4	4	370.000.000	370.000.000	370.000.000
1.04.01.2.09.04				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	44	44	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.04.01.2.09.05				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	800.000.000	800.000.000	800.000.000
1.04.01.2.09.06				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	200.000.000	200.000.000	200.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahun kesatu berdasarkan Renstra Transisi (Renstra RPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan Kabupaten Purwakarta di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan, jembatan dan irigasi yang efisien dan efektif. Konsep pembangunan infrastruktur perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan untuk sektor infrastruktur di seluruh Kabupaten Purwakarta.

Rencana Kerja Perubahan Dinas PUPR disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan dari usulan masyarakat, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari anggaran APBD, APBDProv, APBN maupun sumber lain-nya.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari rencana strategis diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023. Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai persepsi tentang rencana kerja Tahun 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam mencapai sasaran dan tujuan yang lebih ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Semoga Renja yang telah disusun dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta khususnya di bidang Kebinamargaan dan Pengairan.

Purwakarta, 15 Juli 2023

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA



RYAN OKTAVIA, ST, MT
NIP. 19731017 199901 1 001